

LITERASI DIGITAL NETIZEN FAIR 2021 SEMARANG Kementerian Kominfo Ajak Masyarakat Cakap Digital



SEMARANG (KR) - Dalam beberapa tahun terakhir, inovasi teknologi digital berkembang sangat masif dan pesat yang menuntut berbagai perubahan besar di berbagai bidang. Kehadiran teknologi digital membawa kemudahan dan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, layaknya dua sisi koin, teknologi digital pun mendatangkan berbagai bahaya bagi setiap penggunanya. Terlebih saat ini Indonesia sedang menjalankan agenda nasional, transformasi digital yang diimplementasikan melalui percepatan perluasan infrastruktur digital di seluruh penjuru negeri juga harus diimbangi dengan penyediaan sumber daya manusia talenta digital.

Merespons kebutuhan tersebut, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel A Pangerapan mengatakan, tahun ini Kementerian Kominfo bersama GNLD Siberkreasi menginisiasi Program Literasi Digital Nasional yang menasar 12,5 juta masyarakat di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi. Program ini oleh Kementerian Kominfo diimplementasikan melalui berbagai kelas, lokakarya, serta seminar baik secara luring maupun daring yang mengacu pada empat pilar

literasi digital, yaitu Kecakapan Digital, Keamanan Digital, Etika Digital, serta Budaya Digital.

Sebagai rangkaian dari berbagai kegiatan literasi digital yang telah dilaksanakan tersebut, Kementerian Kominfo bersama seluruh mitra dan jejaring, Selasa (23/11) menggelar Literasi Digital 'Netizen Fair 2021', yang akan dilakukan secara serentak dan hybrid di berbagai Kota/Kabupaten selama dua hari hingga Rabu (24/11) di MG Suite Setos Semarang.

"Ada empat kelas membahas berbagai fondasi yang dapat memfasilitasi transformasi digital, mulai dari infrastruktur, aplikasi, regulasi, tata kelola, hingga pengembangan teknologi

penunjang. Namun semua ini kuncinya ada pada SDM digital," tutur Semuel A Pangerapan.

Untuk memperkuat kapasitas talenta digital sekaligus mewujudkan masyarakat Indonesia yang makin cakap digital, program ini melaksanakan berbagai kegiatan secara rutin selain talkshow serta kelas interaktif membahas empat Pilar Literasi Digital.

Zakarsyi Rahman dan Lintang Ratri selaku dosen dari Universitas Diponegoro, Sukma Wahyu Wardhono dari Saka Millennial Pramuka, dan juga Ashta Verin dan M. Youda sebagai Key Opinion Leader dan lainnya. Secara khusus, di Kota Semarang kegiatan Literasi Digital Netizen Fair 2021 mengangkat topik Mengenal Lanskap Digital, Teknologi Merajut Toleransi, Netiket Masyarakat Digital, dan Aman, Nyaman, dan Kreatif di Internet, serta Kelas Animasi dan Implementasi Teknologi untuk UMKM. Selain itu ada juga penampilan hiburan stand up comedy dan hiburan dari band dan Citra Scholastika sebagai hiburan penutup.

(Cha/Bdi)



Wakil Walikota Semarang Ir Hj Hevearita G Rahayu MSos (kiri) bersama para Netizen dalam acara Meti-zen Fair 2021.

KR-Chanda AN

MAYORITAS FRAKSI DORONG PENINGKATAN PAD Raperda APBD 2022 Sepakat Dievaluasi Gubernur



**MIMBAR LEGISLATIF
DPRD KAB. WONOSOBO**

WONOSOBO (KR) - Mayoritas Fraksi DPRD Kabupaten Wonosobo sepakat dengan berbagai catatan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2022 untuk selanjutnya dievaluasi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Wonosobo Eko Prasetyo HW didampingi Wakil Ketua Agus Riyadi di Ruang Rapat Utama DPRD setempat, Senin (22/11) siang.

Dalam Rapat Paripurna dihadiri Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Sekda One Andang Wardoyo, dan para pimpinan perangkat daerah ini, Fraksi PKB melalui juru bicaranya Suwondo Yudistiro berkesempatan menjadi yang pertama menyampaikan pandangannya terhadap Raperda APBD 2022. Fraksi PKB menyetujui Raperda 2022 untuk dievaluasi Gubernur Jateng dan selanjutnya ditetapkan menjadi Perda dengan berbagai catatan.

Salah satunya, Fraksi PKB meminta Pemkab Wonosobo agar dalam penggunaan anggaran berdasarkan skala prioritas

yang menunjang visi dan misi untuk kepentingan masyarakat. Prinsipnya APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan yg lebih matang, sehingga mampu berdampak luas atau memiliki multiplier effect pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab Wonosobo diminta melaksanakan pembangunan sesuai rencana kerja RPJMD 2021-2026, dengan melakukan percepatan serta mempersiapkan regulasi yang tepat. Seperti komitmen prioritas pembangunan jalan antar kecamatan maupun antar desa yang sudah banyak mengalami rusak berat. Pembangunan jalan ini tentu tidak bisa hanya sekali tahun anggaran, sehingga perlu komitmen bersama pada penganggaran tahun-tahun berikutnya.

Selain itu Fraksi PKB juga menyoroti turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,5%, sehingga mendorong

Pemkab Wonosobo untuk lebih kerja keras lagi dengan mengoptimalkan potensi sumber-sumber PAD yang ada. Selama ini ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi, sehingga dengan terus digenjotnya sumber PAD, maka angka ketergantungan terhadap pusat semakin lama semakin mengecil. Pada akhirnya akan terwujud kemandirian daerah yang semakin kuat.

Fraksi Gerindra melalui jubirnya Wahyono, menyatakan setuju Raperda APBD 2022 disahkan setelah dievaluasi Gubernur. Fraksi Gerindra hanya memberikan dua catatan penting, yaitu mengajukan terbentuknya dua Panitia Khusus (Pansus). Pertama Pansus tentang Penyerahan Modal PDAM dan kedua Pansus tentang Penanganan Covid-19 di daerah. Persetujuan terhadap Raperda APBD 2022 juga disampaikan Fraksi PDIP melalui jubirnya, Ira Nurhayati.

Sama seperti mayoritas

fraksi lainnya, ada beberapa catatan strategis yang perlu ditindaklanjuti untuk menjadi pertimbangan. Seperti harapan agar APBD 2022 diniatkan dan diorientasikan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Terutama untuk menjawab kebutuhan dan persoalan aktual dan faktual masyarakat Wonosobo yang saat ini notabene sebagai kabupaten termiskin di Jateng.

Dijelaskan, kemiskinan merupakan suatu fenomena yang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemkab Wonosobo. Untuk itu dalam upaya percepatan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu menaikkan proporsi anggaran belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal positif guna melakukan aktivitas pembangunan berkaitan program-program untuk kepentingan publik. (Art)



Suasana Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Wonosobo dihadiri Bupati, Sekda, dan para pimpinan perangkat daerah.

KR-Ariswanto

Absensi Saenaga bagi ASN Pemkab Klaten

KLATEN (KR) - Para ASN Pemkab Klaten wajib absensi menggunakan sistem informasi presensi elektronik abdi satya negara (Saenaga). Absensi secara elektronik dengan aplikasi berbasis android tersebut mulai berlaku Senin (22/11). Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Klaten Surti Hatini mengemukakan, peluncuran aplikasi Saenaga untuk lebih meningkatkan profesional, integritas, dan disiplin ASN. Dijelaskan Surti, Saenaga merupakan aplikasi absensi elektronik yang diadopsi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jateng dan dikembangkan di Klaten bersama BKPPD dan Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) Kabupaten Klaten. Aplikasi Saenaga sudah diuji coba terbatas selama tiga bulan di BKP-PD, BPKD, Inspektorat, DPMPSTP, Disperwaskim, Dinas Kesehatan, serta di 200 sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. "Untuk sosialisasi sudah dimulai sejak Oktober lalu. Hari Senin (22/11), mulai dilaksanakan, para ASN di Kabupaten Klaten, sudah menggunakan presensi dengan Saenaga," ujar Surti.

Guna optimalisasi sistem informasi kepegawaian, Saenaga juga terintegrasi dengan 'Sri Manganti' (Sistem Informasi Pemberian Cuti), 'Sepakat' (Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan Abdi Satya Negara) dan 'Saestu' (Sistem presensi elektronik terintegrasi dengan Sepakat untuk pembayaran TPP). Bupati Klaten Sri Mulyani, berpesan pada Kepala OPD dan Camat, untuk memberikan pembinaan dan bimbingan kepada ASN terkait aplikasi Saenaga. (Sit)

Stok Vaksin Covid-19 Hampir Kedaluwarsa

SEMARANG (KR) - Anggota Komisi E DPRD Jateng Ida Nurul Farida minta kepada Pemprov Jawa Tengah untuk mempercepat distribusi vaksin di Jateng. Hal itu terkait laporan adanya vaksin covid 19 yang kedaluwarsa di NTT, Jateng dan DIY yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Ida Nurul Farida menyampaikan hal ini kepada wartawan di Semarang Selasa (23/11). Ida berharap vaksin tersebut bisa segera disalurkan sebagaimana mestinya, terutama ke daerah yang vaksinasinya masih rendah, mengingat belum 100% warga Jawa Tengah ter vaksinasi.

"Saya minta kepada Dinas Kesehatan Jateng agar vaksin yang hampir kadaluarsa itu segera didistribusikan ke daerah-daerah yang capaian vaksinasinya masih rendah. Meski kasus Covid-19 di Jateng kini sudah menurun, vaksinasi harus tetap digenjot agar distribusi vaksin tetap berjalan dan tidak sampai kadaluarsa," tutur Ida.

Di Jateng terdapat 10 daerah yang belum mencapai target 50 persen vaksinasi untuk lansia, yaitu Jepara, Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Purbalingga, Pati, Batang, Banjarnegara, Blora, dan Kudus. Menurut Ida, proses distribusi vaksin tersebut dapat dipercepat dengan melibatkan berbagai unsur dalam proses distribusinya, baik pemerintah, TNI, Polri, bahkan ormas dan Parpol. Dengan melibatkan berbagai unsur.

Jangan sampai vaksin yang diberikan tempat masih kesulitan untuk mendapatkannya, justru ada vaksin yang kedaluwarsa dan harus dibuang. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Jateng, sampai saat ini lebih dari 19 juta orang sudah mendapatkan vaksin dosis satu. atau sebanyak 66,16 persen dari target vaksinasi, dan sebanyak 41,5 persen sudah mendapatkan dosis kedua. (Bdi)

BINDA Jateng Gelontorkan Vaksin ke Boyolali

BOYOLALI (KR) - Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Jateng bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Wonosobo, Dinkes Kabupaten Boyolali, Dinkes Kabupaten Wonosobo, menyelenggarakan vaksinasi massal bagi pelajar, santri dan masyarakat secara door to door.

Vaksinasi ini merupakan bentuk dukungan BIN terhadap upaya pemerintah mewujudkan kekebalan komunal/herd immunity pada akhir 2021.

Sebanyak 9.000 dosis vaksin disiapkan BINDA Jateng pada Senin (22/11), untuk pelaksanaan vaksinasi di 8 titik lokasi di Kabupaten Boyolali dan Wonosobo. Untuk vaksinasi terhadap Pelajar Santri dilaksanakan di Ponpes Al Mubarak, Desa Manggis, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, sementara door to door dilaksanakan di 4 titik di Wonosobo, dan 3 titik di Boyolali.

"Di Wonosobo meliputi, Desa Sitiharjo, Desa Mlandi, keduanya di Kecamatan Garung. Kemudian di Desa Krinjing, Desa Wonokampir, keduanya di Kecamatan Watumalang. Sementara di Boyolali, dilaksanakan di Desa Urut Sewu Kecamatan Ampel, Desa Sempu, Kecamatan Andong dan Kec. Selo meliputi Desa Samiran, Desa Jrahak serta Desa Selo," ujar Kepala BINDA Jateng Brigjen TNI Sondi Siswanto.

Dikatakan, capaian Vaksinasi di Boyolali per 21 November 2021 sangat baik

mencapai 78,95% jauh diatas rata-rata provinsi sebesar 68,54%. Namun, untuk Kabupaten Wonosobo masih dibawah rata-rata Provinsi yaitu baru mencapai 54,34%, sehingga adanya kegiatan ini diharapkan dapat membantu kabupaten kota dalam percepatan vaksinasi Covid-19.

Vaksinasi pelajar dan santri dilaksanakan dalam upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dan menekan terjadinya cluster pelajar. Sementara itu, Vaksinasi door to door pertama kali dikemukakan Kepala BIN

Jenderal Pol (Purn.) Prof Dr Budi untuk membantu masyarakat mengakses vaksin, disamping itu sistem door to door juga terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti vaksinasi.

Vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk menghadapi pandemi Covid-19, disamping tetap

menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pembatasan aktivitas juga perlu dilakukan terlebih menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Binda menghimbau masyarakat untuk menahan diri, tidak melakukan aktivitas diluar rumah dan menimbulkan kerumunan, meskipun telah divaksin. (M-2)



Anggota BINDA Jateng (kaos merah) didampingi perangkat desa 'door to door' ke rumah warga.

KR-Mulyawan

GUNA MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19

Prokes Tetap Diterapkan di Lokasi Pengungsian

PENERAPAN protokol kesehatan (prokes) tetap diberlakukan di lokasi pengungsian, untuk mengantisipasi pengurangan penularan dan penyebaran Covid-19. Warga yang berada di pengungsian akibat bencana tanah longsor tetap diwajibkan mengenakan masker,

menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak.

Hal itu ditegaskan Mensos Tri Rismaharini di lokasi pengungsian korban tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, Senin (22/11). Selain itu, Mensos juga mendatangkan psikolog untuk melakukan trauma 'healing'. Putri Oli-

via yang menjadi yatim piatu karena kedua orangtuanya menjadi korban tanah longsor tidal luput mendapat perhatian. Seorang psikolog yang sengaja didatangkan untuk melakukan trauma healing sejauh ini belum bisa mengembalikan sosok Putri yang periang, karena mengalami trauma berat.

Bencana tanah longsor yang melanda tempat tinggalnya, Dusun Gondang RT 01 RW 01, Desa Pagentan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara, pada Minggu, 21 November 2021, telah meratakan tempat tinggalnya. Tidak hanya itu, peristiwa tragis ini juga telah merenggut jiwa kakak kandungnya, Fino (11) dan ibunya, Partini (38).

Terhadap kondisi seperti itulah, Menteri Sosial Tri Rismaharini perlu me-

nempuh perjalanan sejauh 340 km dari Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, menuju Kabupaten Banjarnegara, Jateng. Secara umum, kunjungan Mensos merupakan bentuk perhatian dan respons pemerintah pusat terhadap daerah terdampak bencana, dalam hal ini Kabupaten Banjarnegara. Tiba pada saat hari sudah gelap, Mensos dan rombongan mengecek titik longsor yang menyisakan puing rumah. Mensos juga meninjau tenda logistik yang didirikan Kemensos tak jauh dari lokasi longsor.

Di sini, Mensos menyerahkan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia maupun kepada korban luka. Bantuan tersebut untuk meringankan sebagian beban mereka. Dan ia meminta masyarakat bersabar atas segala

cobaan. Usai menyerahkan santunan, Mensos berjalan kaki sekitar 300 meter menuju rumah tempat tinggal sementara Putri. Mensos memberikan iPad dan laptop kepada Putri.

Dalam kesempatan itu, Mensos menyerahkan bantuan santunan meninggal dunia kepada ahli waris atas nama Bunga CA (14), Fino (11), Andriyani Erowati (42), Partini (38) dan Gilang Angga Putra. Santunan juga diberikan kepada keluarga korban luka. Yakni keluarga Putri Olivia (7) yang mengalami luka ringan, keluarga Sugito, dan Tukiman. Santunan ahli waris korban meninggal sebesar Rp15 juta/jiwa, korban luka berat Rp5 juta dan luka ringan Rp 2 juta.

(RiniSuryati/
Muchtar M)



KR-Rini Suryati

Mensos Tri Rismaharini menyerahkan santunan baik kepada ahli waris korban meninggal dunia maupun kepada korban luka.